# PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2025

#### KARYA TUGAS AKHIR SEMESTER

#### **JUDUL PENELITIAN**

PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD
105731116721

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

> PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2025

#### **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

#### **MOTTO**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S Al Bagarah:286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan" (Q.R Al Insyirah: 5-6)

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji ALLAH adalah benar"
(Q.S Ar-Rum : 60)

#### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

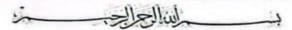
#### Alhamdulillah Robbil'alamin

"Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang tanpa lelah memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya, serta kakakku, sahabat, dan orangorang yan telah memberi support untuk saya dan tak lupa pula untuk almamaterku kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar



#### PROGRAM STUDI AKUNTANSI **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS** UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



#### HALAMAN PERSETUJUAN

. Judul Penelitian

:Pengaruh Sanksi Administratif Dan Kesadaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa

: Andi Nur Alamsyah Arsyad

No. Stambuk/NIM

: 105731116721

Program Studi

Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 19 Agustus 2025 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 22 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Masrullah, SE.,M.Ak NIDN: 0923089201

Indriana, SE., M.Ak NIDN: 0925129501

Mengetahui,

SE.,MM

IBM: 1038-166

Ketua Program Studi

Dr. Mira, SE., M.Ak., Ak

NBM: 1286 844



## PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Andi Nur Alamsyah Arsyad, Nim: 105731116721 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0012 /SK-Y/62201/091004/2025, Tanggal 25 Shafar 1447 H/ 19 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Shafar 1447 H 22 Agustus 2025 M

#### **PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua

: Dr. Edi Justiadi, SE.,MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris

: Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC

(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji

: 1. Dr. Amril, SE., M.Si., Ak., CA

2. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin. SE., M.Ak

3. Hasanuddin, SE., M.Si

4. Masrullah, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

r. Edi Justiadi, SE.,MM

NBM: 1038 166



Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung igra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

#### SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Andi Nur Alamsyah Arsyad

Stambuk

: 105731116721

Program Studi

: Akuntansi

Judul Skripsi

: Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran

Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia membawa sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Nim: 105731116721

.... .......

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dr. Mira, SE., M.Ak., Ak NBM: 1286 844

.....

NRM 1038 166

#### HALAMAN PERNYATAAN

#### PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Alamsyah Arsyad

NIM : 105731116721

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karva : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

SMUHAN

Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 22 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

NIM: 105731116721

### KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul "Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep."

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua penulis bapak H. Andi Arsyad Mattalunru dan Ibu Hj Halwiah, yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, dan pengorbanan yang tidak terhingga. Segala pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bimbingan dan cinta kasih yang telah kalian berikan sepanjang hidup saya. Untuk saudara-saudara saya tersayang, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, motivasi dan semangat yang kalian berikan selama ini selalu menjadi kekuatan bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh keluarga besar saya, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu mengalir untuk saya. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan

cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

- Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPU Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 3. Ibu Dr. Mira, SE.,M.AK.,AK., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bapak Masrullah, S.E., M.Ak., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
- 5. Ibu Indriana, S.E., M.Ak., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
- 6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
- Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kepada Pegawai Kantor Samsat Pangkep yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan penulis melakukan Penelitian.
- Kepada Kakak saya dan Ipar saya yang selalu memberikan saya motivasi, semangat, dukungan, dan pengalaman. Dan kepada almarhumah nenekku tersayang (Hj. Dani Dg. Niati) terima kasih atas doa dan kasih sayang yang

telah menjadi fondasi hidupku. Meski engkau tidak hadir secara fisik untuk menyaksikan pencapaian ini, nilai-nilai yang kau tanamkan tetap menyertai setiap langkahku. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terindah di sisi-Nya.

- 10. Teruntuk sahabat-sahabat saya Miftahuddin, Andika, Ade Wahyudi, Rahmat Hardanil, Muh. Idris, Rizka Safitri, A. Wahdatul Ramadana, Afifah Khairunnisa. A dan teman teman saya di Kampung terima kasih atas segala motivasi, semangat, dukungan, pengalaman, dan waktu yang dijalani bersama selama perkuliahan. See you on top guys!
- 11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamnya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Hag, Fastabigul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 1 Juni 2025

**Andi Nur Alamsyah Arsyad** 

#### **ABSTRAK**

Andi Nur Alamsyah Arsyad, 2025. Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Masrullah dan Indriana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik sanksi administratif maupun kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas penerapan sanksi dan peningkatan kesadaran pajak masyarakat dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

STAKAAN DAN

#### **ABSTRACT**

Andi Nur Alamsyah Arsyad, 2025. The Influence of Administrative Sanctions and Motor Vehicle Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Tax Payment Compliance at the Samsat Office of Pangkep Regency. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Masrullah and Indriana.

This study aims to analyze the effect of administrative sanctions and taxpayer awareness on the compliance of motor vehicle tax payments at the Samsat Office in Pangkep Regency. The research uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 respondents who are motor vehicle taxpayers. Data were analyzed using multiple linear regression with the help of Statistical Package for the Social Science (SPSS) software version 30. The results show that both administrative sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant influence on motor vehicle tax payment compliance. These findings suggest that enhancing the effectiveness of sanctions and improving public tax awareness can promote taxpayer compliance, thereby supporting the increase of regional tax revenue.

Keywords: Administrative Sanctions, Taxpayers Awareness, Taxpayer Compliance

#### **DAFTAR ISI**

SAMP	PUL	i
HALA	MAN SAMPUL	ii
MOTT	O DAN PERSEMBAHAN	iii
HALA	MAN PERSETUJUAN	iv
HALA	MAN PENGESAHAN	v
SURA	T PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALA	MAN PERNYATAAN	vii
	PENGANTAR	
	RAK	
	RACT	
DAFT	AR ISIS. MUH.	xiii
DAFT	AR TABEL	xv
DAFT	AR ISIAR TABELAR GAMBARAR GAMBAR	xvi
DAFT	AR LAMPIRAN	xvii
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah  Tujuan Penelitian	6
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Manfaat Penelitian	6
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA	8
A.	Grand Theory	8
B.	Teori Perpajakan	9
C.	Sanksi Administratif	16
D.	Kesadaran Wajib Pajak	16
E.	Kepatuhan Wajib Pajak	17
F.	Penelitian Terdahulu	18
G.	Kerangka Berpikir	25
Н.	Hipotesis Penelitian	25
BAB I	II METODE PENELITIAN	28
A.	Jenis Penelitian	28
B.	Lokasi Penelitian	28
C.	Jenis Data dan Sumber Data	29

D.	Populasi Dan Sampel	29
E.	Metode Pengumpulan Data	31
F.	Definisi Operasional Variabel	32
G.	Metode Analisis Data	34
H.	Uji Hipotesis	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B.	Penyajian Data Hasil Penelitian	49
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	64
BAB V	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
DAFTA	SaranAS WUH4	72
LAMPI	RAN RAN AKASO A	75
	30	

STAKAAN DAN PET

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan	Bermotor
Wilayah Pangkep Tahun 2020-2024	3
Tabel 2. 1 Peneltian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	33
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas  Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji T	61
Tabel 4. 11 Hasil Uji F	63
The same of the sa	

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	26
Gambar 4. 1Struktur Organisasi Kantor Samsat Pangkep	41
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot	56
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59



#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penelitian Dan Balasan Penelitian	. 77
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	. 81
Lampiran 3 Tabulasi Data Responden	. 84
Lampiran 4 R Tabel	. 85
Lampiran 5 T Tabel	. 86
Lampiran 6 F Tabel	. 87
Lampiran 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif	. 88
Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Data	. 88
Lampiran 9 Hasil Uji Reabilitas DataLampiran 10 Hasil Uji Normalitas	. 89
Lampiran 11 Hasil Uji Multikolonieritas	
Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	. 91
Lampiran 13 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	. 91
Lampiran 14 Hasil Uji T	
Lampiran 15 Hasil Uji F	. 92
Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)	. 92
Lampiran 17 Dokumentasi	. 93
TAKAAN DAN PER	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib di bayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Nurdin et al., 2022). Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar (Sebayang & Reza Hanafi Lubis, 2022). Dalam konteks ini pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi krusial, karena kedua instrumen ini merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek pembangunan tingkat lokal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat. Salah satu penerimaan pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun telah berpengaruh terhadap jumlah pemasukan daerah. Namun hal tersebut tidak akan berlaku apabila wajib pajak tidak patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut (Nurdin et al., 2022) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang wajib pajak bisa dikatakan patuh dalam membayar pajak apabila tidak memiliki tunggakan pajak apapun. Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai dengan yang ditargetkan maka akan menghambat proses pembangunan negara. maka dari itu perlu untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan Bermotor wilayah Pangkep tahun 2020-2024:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Pangkep Tahun 2020-2024

Tahun	Unit	Target	Realisasi
2020	45.401	37.543.201.000	25.516.473.823
2021	45.676	40.292.606.000	27.333.394.261
2022	44.525	44.764.239.000	27.366.861.102
2023	46.156	49.019.979.000	32.056.242.199
2024	48.719	S 44.511.514.000	32.956.107.582

Sumber Data: Kantor Samsat Pangkep

Berdasarakan data yang disajikan, terihat adanya feenomena ketidakpatuhan pembayaran pajak yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Meskipun jumlah unit wajib pajak mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan dari 45.401 unit pada tahun 2020 menjadi 48.719 unit pada tahun 2024, namun realisasi penerimaan pajak konsisten berada dibawah target yang ditetapkan. Kesenjangan antara target dan realisasi ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, dimana pada tahun 2020 realisasi hanya mencapai 67,98% dari target, bahkan mengaami penurunan drastis pada tahun 2021 dan 2022 dengan tingkat pencapaian masing-masing 67,84% dan 61,13%.

Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika melihat bahwa meskipun target penerimaan pajak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, realisasi penerimaan tidak mampu mengimbangi pningkatan tersebut secara proporsioal. Tahun 2023 menunjukkan sedikit

perbaikan dengan realisasi mencapai 65,38% dari target, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 74,03%. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam sistem perpajakan, kesenjangan yang konsisten antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi actual ni menunjukkan urgensi perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sector perpajakan.

Melihat fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak tersebut, maka penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak (Labangu Lestari et al., 2021). Menurut (Nurdin et al., 2022) sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian dari pelanggar peratuan perundang-undangan perpajakan kepada negara yang terdiri bunga, denda dan kenaikan pajak dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya menurut (Erly Suandy, 2014) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kesadaran dari Wajib Pajak akan perpajakan dan kesediaan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya sesuai dengan perundangundangan perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak berdampak pada seberapa besar kemungkinan wajib pajak untuk mendaftar sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar.

Penelitian terkait sanksi administratif, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak terdahulu mengenai pengaruh sanksi

administratif terhadap kepatuhan pembayaran pajak diantaranya adalah penelitian oleh (Salsabilla & Nurhayati, 2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kawaluyaan. Sedangkan hasil penelitian menurut (Mahasari, 2023) menunjukkan sanksi administrasif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Selanjutnya mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak diantaranya adalah penelitian menurut (Nurdin et al., 2022) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Muna. Namun sebaliknya hasil penelitian menurut (Rani Aprilia & Rusdi, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sanksi administratif dan kesadaran pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Ringan, 2023). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada waktu, tempat dan subjek penelitian yang difokuskan pada pengaruh sanksi administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Apakah sanksi administratif berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak?
- 2. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh sanksi administrasif dan kesadran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada Kantor Samsat Kab. Pangkep.

#### D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi peneliti, penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pembayaran pajak
- Bagi Instansi Kantor Samsat Kab. Pangkep, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa saran sejauh mana sanksi administratif pajak dan kesadaran dapat diterapkan pada masyarakat kab. Pangkep.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai penyebab yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayarkan pajak kendaraan bermotor.



#### BAB II

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### A. Grand Theory

#### 1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan, seperti yang didefinisikan oleh (Safina Fatmawati, 2022), adalah teori yang menjelaskan mengapa orang-orang tertentu mengikuti norma-norma yang ditetapkan untuk mereka. Wajib pajak patuh pada hukum karna sadar akan kewajibannya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk memenuhinya. Wajib pajak yang melakukan upaya yang tulus untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka dengan mengajukan dan membayar pajak mereka tepat waktu membantu negara memenuhi janjinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan menghindari hukuman untuk melakukannya.

Teori ini dapat digunakan untuk membahas mengenai kepatuhan wajib pajak karena teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan menguntungkan wajib pajak sendiri sehingga turut berkontribusi untuk negara demi terwujudnya negara yang maju.

#### B. Pengertian Perpajakan

#### 1. Pengertian Perpajakan

Pajak atau iuran adalah salah satu cara Negara dalam mengatasi masalah perekonomiannya karena jumlah pengeluaran Negara yang terus meningkat yang diwajibkan kepada masyarakat. Pajak juga merupakan bukti bakti kepada Negara yang dilihat paling efektif dalam proses pembangunan Negara (Masrullah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (Hantono & Sianturi, 2022), Sedangkan menurut (Januar Sonya Maulani Kusasih, 2022), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

#### 2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut :

#### a. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran memiliki keseimbangan.

#### b. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan pemerintah.

#### c. Fungsi Pemerataan

Pajak memiliki fungsi pemerataan artinya fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

#### d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi.

Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Fungsi pajak adalah:

- 1) Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan Negara.
- 2) Pajak adalah alat untuk mendorong investasi.
- 3) Pajak merupakan alat redistribusi.

Pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmurnya masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melangsungkan kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, Fungsi pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari

masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

#### 3. Jenis-Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan objek pajak.

a. Ditinjau dari golongan, Pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

#### 1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut apabila terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

b. Ditinjau dari wewenang pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 (dua)
 yaitu:

#### 1) Pajak Negara

Merupakan Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian keuangan dalam lingkup direktorat jendral pajak. Contohnya pajak penghasilan.

#### 2) Pajak Daerah

Merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.

#### c. Ditinjau dari sifat, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

#### 1) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wilayah pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Contohnya pajak penghasilan.

#### 2) Pajak Objektif

Merupakan pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut lembaga pemungutanya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Sembiring, 2023).

Sistem pemungutan di Indonesia terdiri dari tiga jenis yaitu :

a. Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

#### Ciri-cirinya:

- 1) Besarnya hutang pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri.
- Mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan perpajakan, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- b. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

#### Ciri-cirinya:

- 1) Sifat wajib pajak pasif.
- 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus
- c. With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak (Waluyo, 2018).

#### 5. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sembiring, 2023).

#### 6. Pajak Kendaraan Bermotor

UU pajak daerah yang mengatur tentang peraturan perpajakan terkait pajak kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 3-8 pada bagian kedua UU No. 28 Tahun 2009 (Sembiring, 2023). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga objek pajak dari kendaraan bermotor secara otomatis adalah pemilik dan penguasa dari kendaraan bermotor (Kowel, 2019).

Dengan kata lain, biaya wajib yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan roda dua atau lebih yang pemanfaatanya diatur pada peraturan pemerintah daerah (Sembiring, 2023). Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yaitu :

- a. Kereta Api
- Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internaissional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah.

- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual.
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita (Sembiring, 2023).

#### C. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi perpajakan merupakan hukuman yang dibebankan kepada wajib pajak yang melanggar atau terlambat melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo berupa pembayaran sejumlah uang kepada kas negara. Sesuai Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994, Apabila pada saat jatuh tempo, wajib pajak belum membayar atau kurang bayar atas kewajiban pajak yang dimilikinya, maka wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan, terhitung saat telah jatuh tempo hingga batas maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

#### D. Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian Balqis & Rusdi, (2020) mengutip pernyataan Rahayu bahwa "kesadaran pajak" mengacu pada kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab kenegaraan seseorang dengan membayar bagian pajak yang adil untuk mendukung upaya pembangunan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak, peneliti Wardani dan Rumiyatun dalam penelitiannya (Karlina & Ethika, 2021) menggunakan banyak indikator, antara lain: Pertama, Untuk memenuhi komitmen membayar pajak, seseorang harus menyadari haknya dan adanya kewajiban tersebut. Kedua kepercayaan wajib pajak terhadap pendanaan untuk pemerintah daerah dan negara bagian. Ketiga, memotivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Lebih lanjut, (Utomo & Iswara, 2021) menyatakan bahwa indikator seperti. Pertama, Pajak

ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa. Kedua, Menyisihkan setiap tahun untuk bayar pajak. Ketiga Pembebasan pajak dan penundaan pajak berdampak buruk bagi pemerintah. Keempat, Pajak dibayar tepat waktu sesuai kebutuhan.

#### E. Kepatuhan Wajib Pajak

. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. (Ademarta, 2014) kepatuhan Wajib Pajak, yaitu yang dimana Wajib Pajak: paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan; tepat /dalam mengisi formulir; benar dalam menghitung jumlah pajak; dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kepatuhan perpajakan (Isyatir, 2015) adalah kewajiban yang dipenuhi Wajib Pajak berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib

Pajak tidak memiliki tunggakan maupun keterlambatan membayar pajak. (Harfiani, Mursalim, 2023).

#### F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa tinjauan empiris atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari kajian terdahulu ini adalah untuk menemukan inspirasi baru untuk menetukan posisi penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut merupakan beberapa uraian tinjauan empiris/penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Peneltian Terdahulu

		2511A	SCAMMA		
No.	Nama Peneliti Dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Arum Indrasari, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, Sudirwan S, (2020).	Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Independen : Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakn, Dan Kesadaran Wajib pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Khorida AR,Arni Bakar, Haryanto, (2020).	Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran	Independen: Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi

		Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten.	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.		perpajakan, dan kesa daran wajib pajak bersama- sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja.
3.	Utami Widya Karlina, dan Mukhlizul Hamdi Ethika,(2020).	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Independen: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Metode Kuantitatif	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakkendara an bermotor.
4.	Masrullah, Asriati, Nur Reski Alfiah S, (2021)	Penerapan Self Assestment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak	Independen: Penerapan Self Assestment System Dependen: Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian realisasi pelaporan pajak menggunaka n Self Assesment System di Badan Pendapatan

	WWW * UPT PER	Dikabupaten Gowa.	JHAMMAO, SSAR PENE	TAX X NATION	Kabupaten Gowa pada tahun 2018 penerimaan pajaknya sebesar Rp 11.056.558.0 00 dari 326 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Dan demikian, pada tahun 2019 penerimaan pajaknya sebesar Rp 13.870.577.2 00 dari 181 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
					Daerah
5.	Fatmawati,S & Adi, S (2022).	Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat	Independen: Kesadaran Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan tingkat pendapatan mempengaru hi kepatuhan wajib pajak Kualitas

		Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta).	Pendapatan, Dan Sanksi Pajak <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor		pelayanan perpajakan, tingkat pemahaman pajak dan pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.
6.	Dira santika sebayang,Reza Hanafi (2022).	Pengaruh Pengenaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Penerapan E- Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara.	Independen: Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Parsial Sanksi Administrasi Perpajakan (X1), dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) diterima yang artinya berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Penerapan Program E- Samsat ditolak yang artinya tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
7.	Ni Nengah Ayu Mahasari, (2023).	Pengaruh Sistem	Independen: Kualitas	Metode Kuantitatif	Bukti empiris menemukan

8.	Risnamita Salsabila dan Nunung Nurhayati, (2023).	Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bandar Lampung.  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi	Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.  Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi	Metode Kuantitatif	bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, sistem kualitas pelayanan, sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
	JPT PER	Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Samsat Kawaluyaan.	Administrasi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua	IAIVO.	bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kawaluyaan.
9.	Rani Aprilia Dan Rusdi,(2023).	Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan	Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan	Metode Kuantitatif	Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada kendaraan

					Ţ
40	Angeline Warren		Fiskus.  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	H * NY	bermotor dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan fiskus sekaligus. Terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari fiskus, namun pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan lebih besar.
10.	Angelina Yenny Ringan, (2023).	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Konawe).	Independen: Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe, 2) Kualitas pelayanan

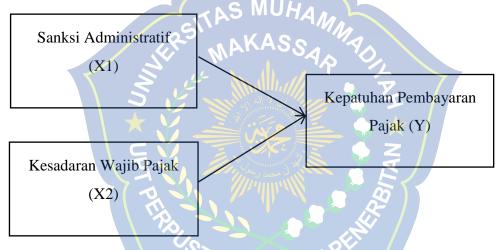
11	Harfiani, Mursalim, Juliyanty Sidik Tjan (2023).	Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep	Independen: Akses perpajakan, Kewajiban moral, Love of money. Dan Persepsi adanya reward. Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Metode Kuantitatif	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe dan 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe.  Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel akses pajak, kewajiban moral dan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel love of money
					sedangkan variabel love

				,	wajib p	ajak.	
--	--	--	--	---	---------	-------	--

Sumber data: Diolah penulis

### G. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel independen yaitu: sanksi administratif dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, serta satu variabel dependen yaitu, kepatuhan pembayaran pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

# Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara Statistik terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan dengan yang diungkapkan (Palit et al., 2021) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herwinarni, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sanksi administratif berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

# 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Salah satu variabel yang sering digunakan untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai iktikad baik seseorang dalam membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian terdahulu diukur dengan beberapa indikator yang menggambarkan pemahaman wajib pajak sebagai warga negara dan kewajibannya untuk membantu pembangunan nasional dan daerah melalui pembayaran pajak. (Anggraini, 2021) merumuskan model

konseptual yang menggambarkan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu variabel penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu lainnya memasukkan kesadaran pajak sebagai salah satu variabel bebas dari kepatuhan wajib pajak seperti Krisnadeva dan (Merkusiwati, 2020), dan (Aulia dan Maryasih, 2022). Berdasarkan telaah dari beberapa penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhannya, atau dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020; dan Aulia dan Maryasih, 2022).

H2: Kesadaran wajib pajak Kendaraan Bemotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

#### BAB III

### **METODE PENELITIAN**

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian, populasi adalah seluruh area atau elemen yang diteliti yang terdiri dari subjek atau obyek dengan karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga populasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan. Populasi tidak hanya terdiri dari orang atau manusia; lebih luas, populasi dapat terdiri dari benda lain seperti hewan, objek, benda, dan lainnya yang dapat dipelajari atau diteliti untuk tujuan penelitian. Inti populasi adalah atribut yang akan dipelajari dalam penelitian yang akan dilakukan. Wajib pajak yang melakukan pembayaran di Kantor Samsat Pangkep adalah subjek penelitian ini. STAKAAN DANP

### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kabupaten Pangkep dengan sasaran penelitian bertempat di Kantor SAMSAT Kabupaten Pangkep. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama sekitar 2 bulan, mulai dari bulan 10 Maret 2025 hingga 10 Mei 2025, untuk memperoleh responden yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

#### C. Jenis Data dan Sumber Data

#### Jenis Data

Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan sifatnyna. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif berfokus pada pengujian teori dengan mengukur variabel penelitian menggunakan angka dan menganalisis data tersebut melalui prosedur statistik.

#### 2. Sumber Data

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono, (2018). Data primer bisa berupa opini subyek (orang) secara individu atau grup, akibat observasi terhadap suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan, dan akibat pengujian. Data utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen grafis (table, catatan, risalah, rapat, dan lain – lain) yang dapat memperkaya data primer.

### D. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada Kantor SAMSAT

Kabupaten Pangkep yang jumlahnya mencapai 48.719 wajib pajak tahun 2024, dan peneliti akan menggunakan teknik *Accidental Sampling* yaitu menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui sebagai responden, dengan syarat bahwa orang tersebut sesuai untuk memeberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2. Sampel

Sampel adalah suatu definisi yang diberikan pada populasi tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian akan diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2018).

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin, Berikut Rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

e = Margin of error (dalam decimal, jadi 10% = 0,1)

Melalui rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diketahui:

N = 48.719

e = 0.1

Maka:

$$n = \frac{48.719}{1 + 48.719 \cdot (0,1)^2}$$

$$= \frac{48.719}{1 + 48.719 \cdot 0,01}$$

$$= \frac{48.719}{1 + 487,19}$$

$$= \frac{48.719}{488,19}$$

$$= 99.8$$

Kemudian diperoleh jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 99,8 responden dan akan dibulatkan oleh peneliti menjadi 100 responden. Adapun kriteria sampel yaitu kriteria inklusi sebagai berikut, wajib pajak yang terdaftar di samsat pangkep dan masih aktif membayar pajak, dan memiliki kendaraan bermotor dan adapun kriteria eksklusi yaitu responden yang tidak dapat memberikan informasi yang dperlukan dan wajib pajak dengan kendaraan bermotor yang sudah tidak aktif.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei kuesioner yang akan dibagikan kepada calon responden melalui alat bantu berupa kuesioner elektronik, yaitu google form. Dikarenakan kerahasiaan data wajib pajak, peneliti tidak memperoleh langsung data yang dapat memungkinkan peneliti untuk menghubungi wajib pajak yang benar-benar terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Pangkep. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penyebaran kuesioner kepada calon responden, dengan cara membagikan link kuesioner melalui pesan berantai pada grup whatsapp. Pengukuran kuesioner akan

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini akan menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 point yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Akan ada petunjuk dalam kuisioner ini agar mempermudah responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

## F. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menganalisis pengaruh sanski administratif dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pembayaran pajak sebagai variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu, sanksi admnistratif dan kesadaran wajib pajak. Sanksi Administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknnya. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pembayaran pajak yaitu di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel** 

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Sanksi	Sanksi Administrasi	Keterlambatan	Likert
Administratif (X1)	merupakan	membayar pajak	
	pembayaran	harus dikenakan	
	kerugian kepada	sanksi.	
	negara, khususnya	Tingkat penerapan	
	berupa bunga dan	sanksi pajak.	
	kenaikan. Sanksi	3. Sanksi digunakan	
	administrasi	untuk meningkatkan	
	bertujuan untuk	kepatuhan wajib	
	memberikan efek	pajak.	
	jera kepada wajib		
	pajak sehingga		
	terciptanya		
	kepatuhan wajib		
	pajak s dalam	144	
	melaksanakan	SAPO	
	kewajiban KAS	Sa A	
	perpajakannya.	AP O	
	Sumbor : (Nurdin of)		
	Sumber : (Nurdin et al., 2022)	The second	
Kesadaran Wajib	Kesadaran wajib	1. Kesadaran adanya	Likert
Pajak (X2)	pajak merupakan	undang-undang dan	LIKOIT
r ajan (XZ)	keadaan dimana	ketentuan tentang	
	wajib pajak	perpajakan.	
	menyadari akan	2. Kesadaran akan	
	pentingnya pajak	fungsi pajak	
	tanpa ada paksaan	3. Menghitung,membaya	
	dari pihak lain.	r, melaporkan pajak	
	AKANIE	secara sukarela.	
	Sumber : (Nurdin et		
	al., 2022)		
Kepatuhan Wajib	Kepatuhan wajib	Kepatuhan wajib	Likert
Pajak (Y)	pajak yaitu di mana	pajak dalam	
	wajib pajak	mendaftarkan diri.	
	memenuhi	2. Kepatuhan dalam	
	kewajiban	perhitungan dan	
	perpakannya	pembayaran pajak	
	dengan baik dan benar sesuai	terutang. 3. Kepatuhan dalam	
	dengan peraturan	membayar tunggakan.	
	perundang-	membayai tanggakan.	
	undangan pajak		
	yang berlaku.		
	, ,		
	Sumber : (Nurdin et		
	al., 2022)		
	<u> </u>		

34

Sumber data: Diolah Penulis

G. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis

statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS.

1. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum dari setiap variabel

penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata

(mean), nilai minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2012)

2. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected

Item-Total Correlation lebih besar dari 0,05.

b. Uji reliabilitas digunakan dengan cara melihat Cronbach Alpha (α),

yang dimana satu kuesioner dikatakan reliabel apabila Cronbach

Alpha  $(\alpha) > 0,60$ .

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan

data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan

(Barus, 2016). Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov-

Smirnov lebih dari 0,05.

b. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance (tolerance value) dan

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut-off yang umum

digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas

10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10

maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar

variabel dalam model regresi.

c. Uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji scatterplot. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji scatterplot adalah jika terdapat pola tertentu pada uji scatterplot. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji (Sunyoto, 2011).

a. Analisis Regresi Linear Berganda Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisa regresi linear berganda. Secara umum formulasi dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat (Kepatuhan wajib pajak)

a = Konstanta

b1 = Koefisien Regresi (Sanksi administratif)

b2 = Koefisien Regresi (Kesadaran wajib pajak)

X1 = Nilai Perhitungan Sanksi admistratif

X2 = Nilai Perhitungan Kesadaran wajib pajak

e = Error

b. Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

- variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 Ghozali (2012).
- c. Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabelvariabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamasama dengan menggunakan analisis uji F. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel.
  - Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
  - 2) Jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- d. Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji koefisien secara parsial antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Tingkat signifikansinya ditentukan sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-k, artinya kemungkinan kesalahan yang dapat ditolerir dalam mengambil keputusan.
  - Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
  - Jika t hitung < dari t tabel maka hipotesis penelitian ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

# H. Uji Hipotesis

Hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen yang dimaksud adalah sanksi administratif ,dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen berupa kepatuhan pembayaran pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.(Arum Indrasari, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah,



#### **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

## 1. Sejarah Singkat Kantor Samsat Wilayah Pangkep

Samsat Kabupaten Pangkep dibentuk sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk menyederhanakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui sistem satu atap. Pembentukan ini didasarkan pada Instruksi Bersama Menteri Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, dan Nomor 61/IMK.014/1999. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang perpajakan kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengelola obyek pajak secara lebih luas. Awalnya terdapat 10 UPTD Samsat dan 13 Samsat Pembantu, namun berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No. 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, jumlah UPT bertambah menjadi 15, dan hingga tahun 2017, UPT telah hadir di semua kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pangkep.

## 2. Visi Misi Kantor Samsat Wilayah Pangkep

Adapun visi misi Kantor Samsat Wiayah Pangkep yaitu sebagai berikut:

#### a. Visi

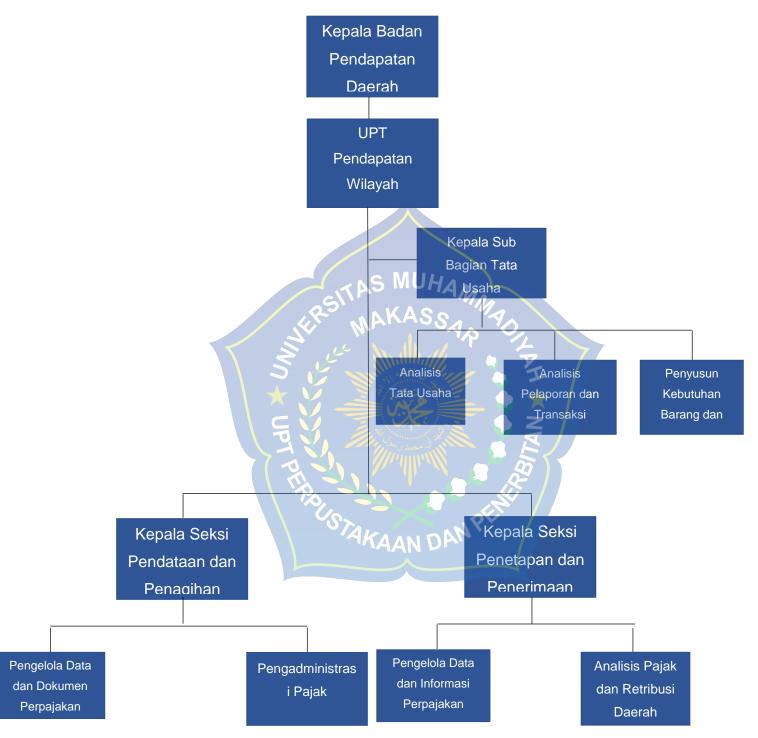
Maksimalnya Peningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel Dan Inovatif.

### b. Misi

- Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10 %.
- Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- 3) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam mengelola pendapatan daerah.
- 4) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan dan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

# 3. Struktur Organisasi Kantor Samsat Wiayah Pangkep

Struktur organisasi merujuk pada susunan dan hhubungan antar berbagai bagian dan posisi di dalam suatu organisasi. Ini mencerminkan adanya pembagian kerja, fungsi, serta tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Di bawah ini, anda dapat melihat pembagian struktur organisasi yang berlaku di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Pangkep:



Gambar 4. 1Struktur Organisasi Kantor Samsat Pangkep

Sumber: Kantor Samsat Pangkep

### 4. Deskripsi Pekerjaan Kepegawaian Kantor Samsat Wilayah Pangkep

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
  - Menyusun kebijakan teknis dan strategi di bidang pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.
  - Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - 3) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - 4) Membina teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan, termasuk pembinaan administrasi pendapatan daerah dan pemungutan pendapatan asli daerah.
  - Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - 6) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan data pendapatan dan bagi hasil pajak dengan perangkat daerah pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - Mengkoordinasikan dan berkonsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah terkait pengelolaan pendapatan daerah.
  - 8) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan.

9) Menetapkan kebijakan dan tata cara pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

# b. UPT Pendapatan Wilayah

- Melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Samsat
- 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

### c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- 1) Penyusunan Program Kerja.
- 2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- 3) Pengelolaan Administrasi Keuangan.
- 4) Mengelola administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang/aset, serta kearsipan.
- 6) Mengelola urusan ketatausahaan surat menyurat dan kearsipan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris atau pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### d. Analisis Tata Usaha

- Mengumpulkan bahan mengenai tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku guna meningkatkan kinerja UPT Pendapatan.
- Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan mengenai tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga agar memperlancar pelaksanaan tugas pada UPT Pendapatan.
- 3) Mengadakan penelitian terhadap permasalahan tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga guna mencari solusi dan memperbaiki kinerja UPT Pendapatan.
- 4) Membuat laporan hasil kinerja tata usaha secara berkala kepada pimpinan untuk pengawasan dan pengevaluasian.
- 5) Memberikan saran berdasarkan hasil penelitian permasalahan tata usaha dan pemanfaatannya disampaikan kepada pimpinan untuk meningkatkan kinerja UPT Pendapatan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- e. Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan.
  - Mengumpulkan hasil transaksi keuangan pada lingkup UPT Pendapatan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Memeriksa dan menelaah laporan hasil transaksi keuangan dibandingkan dengan nominal transaksi untuk memperlancar pengevaluasian pelaksanaan tugas.
- 3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan laporan dalam transaksi keuangan dalam rangka menemukan solusi untuk permasalahan yang ada dan meningkatkan kinerja.
- 4) Membuat laporan rekapitulasi transaksi keuangan secara berkala yang disampaikan kepada pimpinan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.
- 5) Memberikan saran berdasarkan hasil penelitian laporan transaksi keuangan pada lingkup UPT Pendapatan kepada pimpinan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- f. Penyusun Kebutuhan Barang dan Investaris.
  - Menerima dan memeriksa barang inventaris kebutuhan UPT Pendapatan dengan membandingkan karakteristik, spesifikasi dan hal-hal terkait barang inventaris untuk disesuaikan dengan data rencana kebutuhan inventaris sebagai salah satu bentuk pengevaluasian dan pengawasan.
  - Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan barang inventaris yang ada berdasarkan pengguna barang, ketahanan barang dan kegunaan barang untuk memudahkan pencarian apabila diperlukan.

- 3) Mempelajari dan mengkaji kembali kebutuhan barang inventaris tahun berjalan dalam rangka penyusunan kebutuhan barang inventaris tahun yang akan datang.
- 4) Menyusun konsep penyusunan barang inventaris tahun yang akan datang berdasarkan kajian tahun berjalan agar kinerja lebih baik dan sesuai dengan harapan.
- 5) Mendiskusikan konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris dengan pimpinan dan pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 6) Mengevaluasi konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris sesuai dengan hasil diskusi sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran.
- 7) Melaporkan hasil kinerja secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- g. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan.
  - 1) Penyusunan program kerja seksi.
  - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis, koordinasi dan pembinaan.
  - 3) Pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
  - 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
  - 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- h. Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan

- Mengumpulkan data dan dokumen perpajakan secara berkala sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
- 2) Mengklasifikasikan data dan dokumen perpajakan sesuai dengan jenisnya agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.
- Memeriksa data dan dokumen perpajakan agar terjadi kesesuaian dan ketepatan antara data dan dokumen perpajakan dengan objek perpajakan.
- 4) Mengkoordinasikan data dan dokumen perpajakan dengan pimpinan dan pihak-pihak terkait agar dapat terlaksana hasil yang lebih optimal.
- 5) Menyusun laporan mengenai rekapitulasi hasil data perpajakan secara berkala kepada pimpinan untuk memudahkan pengawasan dan menjadi pertimbangan untuk peraturan dan kebijakan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- Pengadministrasi Pajak.
  - Menerima data pajak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk melancarkan pekerjaan.
  - 2) Mengelompokkan data pajak menurut peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk memudahkan pencarian.
  - Mendokumentasikan data pajak sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku agar tertib administrasi.

- 4) Melaporkan hasil rekapitulasi data pajak secara berkala sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban.
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- j. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan
  - Melakukan penghitungan dan penetapan pajak, termasuk penetapan secara jabatan dan tambahan.
  - Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
     Menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Memproses
     penerimaan pembayaran pajak.
  - 3) Melakukan pelayanan validasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak.
  - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- k. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan
  - Menyusun data dan informasi perpajakan sesuai dengan permasalahannya sesuai peraturandan kebijakan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
  - 2) Memantau data dan informasi perpajakan agar tidak terjadi penyimpangan dan mengurangi kesalahan.
  - 3) Mengendalikan data dan informasi perpajakan menggunakan saran dan prasarana sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku agar pekerjaan selesai lebih efektif dan efisien

- Mengkoordinasikan hasil data dan informasi perpajakan kepada pihak-pihak terkait agar hasil pelaksanaan pekerjaan lebih optimal.
- 5) Menyusunlaporan data dan informasi perpajakan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan untuk peraturan dan kebijakan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- I. Analisis Pajak dan Retrbusi Daerah
  - 1) Mengumpulkan data Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja lingkup UPT Pendapatan.
  - 2) Menganalisa dan menelaah data Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengklasifikasikan data tersebut kedalam kategorinya masing-masing sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
  - 3) Mengadakan penelitian terhadap masalah dalam data Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mencari solusi yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan.
  - Membuat laporan rekapitulasi data Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala kepada pimpinan agar memudahkan evaluasi dan pengawasan.

- 5) Memberikan saran berdasarkan penelitian terhadap masalah dalam data Pajak dan Retribusi Daerah kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan peraturan dan kebijakan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

## B. Penyajian Data Hasil Penelitian

### 1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para wajib pajak, dan seluruh kuesioner yang dibagikan berhasil dikembalikan dalam kondisi lengkap. Sebelum memasuki pembahasan utama, penulis akan memaparkan terlebih dahulu karakteristik demografis responden yang mencakup jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

### a. Jenis Kelamin Responden

Dalam penelitian ini, responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Distribusi jumlah responden untuk masing-masing kelompok disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	42	42.0	42.0	42.0
	Perempuan	58	58.0	58.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4.1, dari total 100 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang (58%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 42 orang (42%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam penelitian ini.

## b. Usia Responden

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

			Wearing !!	Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	< 20 tahun	11	11.0	11.0	11.0
	> 40 tahun	13	13.0	13.0	24.0
	20-30tahun	/72	72.0	72.0	96.0
	31-40tahun	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025)

Distribusi usia dari 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini disajikan dalam tabel diatas. Data ini memberikan gambaran mengenai rentang usia para responden yang berpartisipasi dalam penelitian.

Berdasarkan data distribusi usia dari 100 responden yang diteliti, mayoritas berada dalam rentang usia 20–30 tahun, yaitu sebanyak 72 orang (72%). Responden berusia di bawah 20 tahun berjumlah 11

orang (11%), usia 31–40 tahun sebanyak 4 orang (4%), dan yang berusia di atas 40 tahun sebanyak 13 orang (13%).

# c. Pekerjaan Responden

Distribusi jenis pekerjaan dari 100 responden yang diteliti disajikan dalam tabel berikut. Data ini memberikan gambaran mengenai latar belakang pekerjaan para responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	ASN	18 Д	18	18	18
	ASN, Wirausaha	2 1	70	21	19
	Dosen	ي لا إلى الله	11/1	1-	20
	Guru	2	2	2	22
	Honorer	2	2	22	24
\	Honorer Guru	No service of the ser	1		25
	Irt	4	4	4	29
	Karyawan honorer	741	1 PK	1	30
Valid	Karyawan Honorer	1 1	1	1	31
	Karyawan kafe	1	1	1	32
	Karyawan Swasta	21	21	21	53
	Karyawan Toko	1	1	1	54
	Konten Kreator	1	1	1	55
	Mahasiswa	25	25	25	80
	Pelaut	1	1	1	81
	Petani	1	1	1	82
	THL	1	1	1	83

Tukang Bentor	1	1	1	84
Wirausaha	16	16	16	100
Total	100	100	100	

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2025)

Berdasarkan data distribusi pekerjaan dari 100 responden yang diteliti, mayoritas responden bekerja sebagai mahasiswa, yaitu sebanyak 25 orang (25%). Kelompok berikutnya adalah karyawan swasta dengan 21 responden (21%), diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 responden (18%), dan wirausaha sebanyak 16 responden (16%). Responden lainnya tersebar dalam berbagai jenis pekerjaan seperti ibu rumah tangga (4%), guru (2%), honorer (2%), dan profesi lainnya masing-masing dengan persentase yang lebih kecil. Distribusi ini menunjukkan bahwa responden berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, dengan dominasi dari kalangan mahasiswa dan karyawan swasta.

### 2. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden telah dilakukan, dan hasilnya disajikan dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Administratif	100	5	25	18.29	4.36306
Kesadaran Wajib Pajak	100	5	25	19.62	4.9945
Kepatuhan Pembayaran Pajak	100	5	25	20.09	4.42695

Valid	Ν	100		
(listwise)		100		

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian menunjukkan bahwa, Variabel Sanksi Administratif memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 18,29, dan standar deviasi 4,363. Variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum 5, maksimum 25, dengan rata-rata 19,62 dan standar deviasi 4,994. Sementara itu, variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak memiliki nilai minimum 5, maksimum 25, rata-rata 20,09, dan standar deviasi 4,426.

# 3. Uji Kualitas Data

## a. Uji Validitas Data

Derajat bebas (degree of freedom/df) dihitung dari jumlah responden dikurangi 2, yaitu df = n - 2. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang digunakan untuk uji validitas kuesioner adalah 100 orang, sehingga derajat bebasnya adalah 98 (100 - 2). Dengan df = 98, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966. Adapun kriteria penilaian validitas Jika nilai signifikansi < 0,05, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka item pertanyaan dianggap tidak valid. Selain itu, item juga dinyatakan valid jika nilai  $^{\Gamma}$ hitung >  $^{\Gamma}$ tabel (0,1966), dan tidak valid jika  $^{\Gamma}$ hitung <  $^{\Gamma}$ tabel.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Cankai Administratif	X1.1	0,770	0,1966	Valid
Sanksi Administratif X1	X1.2	0,636	0,1966	Valid
^1	X1.3	0,824	0,1966	Valid

	X1.4	0,808	0,1966	Valid
	X1.5	0,667	0,1966	Valid
	X2.1	0,898	0,1966	Valid
14 1 147 "	X2.2	0,849	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib	X2.3	0,881	0,1966	Valid
Pajak X2	X2.4	0,901	0,1966	Valid
	X2.5	0,757	0,1966	Valid
	Y1	0,880	0,1966	Valid
Vanatuhan	Y2	0,874	0,1966	Valid
Kepatuhan Pembayaran Pajak Y	Y3	0,839	0,1966	Valid
r <del>c</del> ilibayatati Fajak T	Y4	0,780	0,1966	Valid
	Y5	0,727	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5, seluruh item pernyataan dalam kuesioner menunjukkan bahwa nilai <sup>r</sup>hitung > dari <sup>r</sup>tabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak dinyatakan valid.

## b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu instrumen mampu mengukur secara konsisten dan tepat dari waktu ke waktu. Jika hasil pengukuran konsisten dan stabil dalam berbagai kondisi, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal. Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crombach Alpha	Keterangan	
Sanksi Administratif	0,792	Reliabel	
Kesadaran Wajib Pajak	0,909	Reliabel	

Kepatuhan	0.877	Reliabel	
Pembayaran Pajak	0,077	Keliabei	

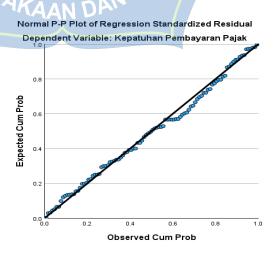
Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,792, Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,909, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,877. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Artinya, seluruh item pernyataan dalam kuesioner dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian selanjutnya karena menunjukkan konsistensi pengukuran yang baik.

# 4. Uji Asumsi Klasik

# a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Berikut grafik. *P-Plot.* Hasil uji normalitas menggunakan program komputer *IBM SPSS Statistics 24*:



Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, untuk menguji normalitas data, dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi normal baku. Jika nilai signifikansi (Sig.) dari uji ini lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov

SAS MUHAN			tandardized Residual
25 NAS MAS			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
5 14	Std. Deviation		2.14535052
Most Extreme	Absolute		.062
Differences	Positive		.062
	Negative —		037
Test Statistic			.062
Asymp. Sig.	(2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Indikator umum yang digunakan adalah nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance ≤ 0,10 atau VIF ≥ 10, maka terdapat

indikasi multikolinearitas. Sebaliknya, jika Tolerance ≥ 0,10 dan VIF ≤ 10, maka tidak ditemukan multikolinearitas dalam model.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas

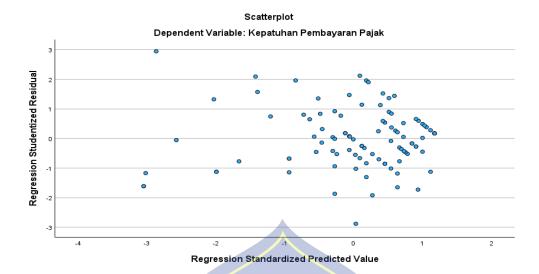
Coefficients <sup>a</sup>									
	Unstandardized Coefficients								
	Model	Tolerance	VIF						
1	(Constant)								
	Sanksi Administratif	.535	1.869						
	Kesadaran Wajib Pajak	M <sub>M</sub> <sub>A</sub>	1.869						

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,535 lebih besar dari 0,10, dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,535 lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 1,869 lebih kecil dari 10 dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 1,869 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam Penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

# c. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah ada tidaknya gejala heteroskedastisitas digunakan uji scatterplot yang dapat dilihat pada gambar berukut:



Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 grafik *scatterplot* dapat dilihat titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

# 5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Analisi Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu Sanksi Administratif (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients				
	В				
(Constant)	4.199				
Sanksi Administratif	.113				
Kesadaran Wajib Pajak .705					
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak					

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan tabel diatas model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Kepatuhan Wajib Pajak = 4,199 + 0,113 X1 + 0,705 X2 + e

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai a sebesar 4,199 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa jika variabel Sanksi Administtratif (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sama dengan nol maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 4,199.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Administratif (X1) sebesar 0,113 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Administratif (X1) progresif mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Sanksi Administratif maka akan mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,113
- c. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,705 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Kesadaran Wajib Pajak maka akan mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,705

# 6. Uji Hipotesis

#### a. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Uji T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model AS MUH	Unstandardiz	ed Coefficients				
2511,0849	MIT	Sig.				
(Constant)	5,461	< 0,001				
Sanksi Administratif	8,544	< 0,001				
Kesadaran Wajib Pajak	17,546	< 0,001				

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Untuk menjelaskan hasil dari uji T pada tabel diatas, terlebih dahulu hitung  $T_{tabel}$ . Diketahui signifikansi 0,05/2=0,025 dengan distribusi t=n-k-1 atau 100-2-1 = 97, kemudian liat pada  $T_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,025 pada jumlah sampel atau n=97, maka diperoleh  $T_{tabel}=1,985$ . Kedua variabel independen setelah diuji menghasilkan uji sebagai berikut:

Hasil Uji T Variabel Sanksi Administratif (X1) Terhadap Variabel
 Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

 ${
m H_a}$ : terdapat pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

 ${
m H}_0$  : tidak terdapat pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Administratif (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,113 bernilai positif (+) yang artinya variabel Sanksi Administratif memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu variabel Sanksi Administratif memiliki  $T_{\rm hitung}$  sebesar 8,544 dan lebih besar dari  $T_{\rm tabel}$  1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan,  $H_{\rm a}$  ditolak yang berarti variabel Sanksi Administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

2) Hasil Uji T Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

H<sub>a</sub>: terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

 ${
m H}_0$  : tidak terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,705 bernilai positif (+) yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki  $T_{\rm hitung}$  17,546 dan lebih besar dari  $T_{\rm tabel}$  1,985 serta

tingkat signifikansinya yaitu 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$ ditolak yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

# b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F berfungsi untuk menentukan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis uji F pada tingkat signifikansi 0,05 dengan membandingkan Nilai  $F_{\rm hitung}$  dengan  $F_{\rm tabel}$ , jika  $F_{\rm hitung}$  >  $F_{\rm tabel}$ , hipotesis diterima dan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $F_{\rm hitung}$  <  $F_{\rm tabel}$ , hipotesis ditolak.

Tabel 4. 11 Hasil Uji F

	て	My May S	<b>ANOVA</b> <sup>a</sup>				
		Sum of	1111/11	Mean			
Model		Squares	df	Square	F	Sig.	
1	Regression	1484.540	2	742.270	158.016	<.001 <sup>b</sup>	
	Residual	455.650	97	4.697			
	Total	1940.190	99				
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak							
b. Prea	lictors: (Const	<i>tant</i> ), Kesadaran	Wajib Paja	ık, Sanksi Adm	ninistratif		

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel F statistik dengan df1= k - 1= 2-1 = 1, dan df2 = n-k-1 = 100-2-1=97 (k : jumlah variabel independen). Dengan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh hasil  $F_{tabel}$  sebesar 3,94.

Nilai  $F_{\rm hitung}$  sebesar 158,016 lebih besar daripada  $F_{\rm tabel}$  yang sebesar 3.94, dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05, Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak.

# c. Uji Koefisien Determinansi (R²)

Koefisien determinansi (R²) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai determinasi berada dikisaran atau antara nol dan satu. Hasil uji koefisien determinansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary									
70	Adjusted R Std. Error of the								
Model	R	R Square	Square	Estimate					
1	.875 <sup>a</sup>	.765	.76	2.16735					

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai dari koefisien determinasi (R *Square*) sebesar 0,765 atau senilai 76,5%. Nilai 76,5% tersebut dapat mengindikasikan bahwa variabel Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama mempengaruhi variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian yang diteliti.

#### C. Pembahasan Hasil Penelitian

# Sanksi Administratif berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Administraif (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,113 bernilai positif (+) yang artinya variabel Sanksi Administratif memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu, variabel Sanksi Administratif memiliki Thitung sebesar 8,544 dan lebih besar dari Ttabel 1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu 0,001 < 0,05. Maka dapat disimpulkan Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti variabel Sanksi Administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan prinsip bahwa sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menimbulkan efek jera dan pajak melalui pengingat akan meningkatkan kepatuhan wajib konsekuensi ketidakpatuhan. Pengaruh positif sanksi administratif terhadap kepatuhan pembayaran pajak dapat dijelaskan karena adanya efek jera dan faktor pengingat yang diberikan melalui sanksi Ketika administratif. wajib pajak menyadari konsekuensi ketidakpatuhan berupa sanksi administratif seperti denda, bunga, atau kenaikan nilai pajak, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Sanksi administratif berperan sebagai alat kontrol yang mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurdin et al., (2022) sanksi administratif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat sanksi yang diterapkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi pula. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Karim, (2021) menunjukkan sanksi aministratif memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya timbulnya wajib pajak dalam membayar pajak biasa disebabkan karena wajib pajak lebih takut dengan sanksi yang diberikan oleh fiskus apabila tidak membayar atau melanggar undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalah dengan teori kepatuhan menurut Tyler (1990), yang menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap peraturan dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu instrumentalberkaitan dengan perhitungan rasional individu terhadap konsekuensi dari indakan mereka, termasuk kemungkinan mendapat sanksi atau hukuman. Dalam konteks perpajakan, sanksi administratif berperan sebagai faktor instrumental yang menciptakan intensif bagi wajib pajak untuk patuh guna menghindari kerugian finansial.

Teori ini menjelaskan bahwa waib pajak akan cenderung patuh ketika mereka mempertimbangkan bahwa biaya ketidakpatuhan (sanksi) lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari tidak membayar pajak. Persepsi bahwa pemerintah tegas dalam menerapkan sanksi menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa sanksi administratif efektif membentuk perilaku patuh melalui

proses atribusi, di mana ancaman hukuman dipandang sebagai penyebab yang bisa dihindari dengan taat aturan. Dengan demikian, sanksi yang diterapkan secara konsisten, tegas, dan adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara rasional (Wardani et al., 2024).

# 2. Kesadaran Wajib Pajak berpegaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,705 bernilai positif (+) yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Selain itu variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki  $T_{\rm hitung}$  17,546 dan lebih besar dari  $T_{\rm tabel}$  1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{\rm a}$  diterima dan  $H_{\rm 0}$  ditolak yang berarti variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran

dalam diri wajib wajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakkannya. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad et al., (2023) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian lain dari Salsabilla & Nurhayati, (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptauhan pembayaran pajak.

Temuan empiris yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak dapat dianalisis melalui perspektif teori kepatuhan. Menurut Tyler (1990), teori kepatuhan membedakan antar dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan instrumental (compliance) dan kepatuhan normatif (commitment). Kepatuhan instrumental didasarkan pada perhitungan perhitungan untung rugi dan ketakutan terhadap sanksi, sedangkan kepatuhan normatif muncul dari kesadaran internal dan rasa tanggung jawab moral. Dengan demikian, penerapan teori kepatuhan dalam analisis ini membantu menjelaskan peningkatan kesadaran wajib bahwa pajak dapat memperkuat kepatuhan normatif terhadap peraturan perpajakan.

Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang signifikan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung mengaitkan kepatuhan mereka dengan pemahaman dan tanggung jawab pribadi terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan kesadaran rendah mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sanksi atau pengawasan dari otoritas pajak (Mahasari, 2023).

Dengan demikian, penerapan teori atribusi dalam analisis ini membantu menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat memperkuat atribusi internal terhadap perilaku kepatuhan. Artinya, ketika wajib pajak menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran pajak, mereka lebih cenderung untuk patuh secara sukarela, tanpa perlu adanya tekanan eksternal. Hal ini sejalan dengan sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, di mana kepatuhan yang didorong oleh kesadaran internal sangat diharapkan (Mahasari, 2023).

#### BAB V

#### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Pangkep dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penerapan sanksi administratif yang konsisten dan tegas oleh Kantor Samsat Kabupaten Pangkep terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nilai koefisien 0,113 dan tingkaat signifikansinya 0,001 < 0,05. Artinya, semakin efektif pemberlakuan sanksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa penegakan aturan melalui mekanisme sanksi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk menghindari konsekuensi akibat keterlambatan atau kelalaian dalam membayar pajak.</p>
- 2. Kesadaran wajib pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangkep dengan nilai koefisien 0,705 dan tingkat signifikansinya 0,001 < 0,05. Ini menegaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah serta hak dan kewajiban mereka, semakin tinggi pula kepatuhan mereka. Dengan besarnya efek kesadaran lebih dominan daripada sanksi administratif peningkatan kepatuhan sebaiknya difokuskan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif.</p>

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang ingin penulis berikan adalah

- Bagi Kantor Samsat Kabupaten Pangkep diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dengan cara memperjelas mekanisme pemberian sanksi, mensosialisasikan konsekuensi keterlambatan pembayaran pajak secara komprehensif, serta memastikan konsistensi dalam penerapan sanksi tanpa adanya pengecualian. Penting juga untuk mengembangkan sistem pengingat otomatis melalui SMS atau aplikasi mobile yang dapat memberitahu wajib pajak mengenai tenggat waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka beberapa minggu sebelum jatuh tempo, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran dan pengenaan sanksi administratif. Hal ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus membangun persepsi publik bahwa sistem perpajakan berjalan dengan adil dan profesional.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pendapatan wajib pajak, atau faktor demografi lainnya. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan metode penelitian yang lebih komprehensif dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Selain itu, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian ke beberapa Kantor Samsat di kabupaten/kota lain sebagai perbandingan, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Arum Indrasari, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, S. S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11. https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, *6*(1), 747–758. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628
- Harfiani, Mursalim, J. S. T. (2023). Peng
- aruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep, 1(September 2021), 144–154.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full\_Text.pdf
- Januar Sonya Maulani Kusasih, N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 1). https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30
- Labangu Lestari, Y., Nurdin, E., & Guntur, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kendari). 6(1), 154–169.
- Mahasari, N. N. A. (2023). Pengaruh Sistem Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhdap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung. *Koferensi Ilmiah Akuntansi X*, 298–6397, 1–18.
- Masrullah, M., Asriati, A., & Alfiah S, N. R. (2021). Penerapan Self Assesstment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak

- Dikabupaten Gowa. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *4*(1), 23–33. https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5304
- Muhammad, F. A., Suparyati, A., Gazali, M., & Octaviani, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Tangerang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Nurdin, E., Tamburaka, S., & Fadila, S. N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 7(1). https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24522
- Palit, R., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 22–28. https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.531
- Ramadhan, E. K. (2022). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2020. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 600–607. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.626
- Rani Aprilia, & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236–249. https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.91
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *JURNAL ECONOMINA*, 2(7), 1699–1718. https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.667
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 883–89909.
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *3*(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983
- Sebayang, D. S., & Reza Hanafi Lubis. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 1(2), 155–168. https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.507
- Sembiring, D. S. B. (2023). Pengaruh Modernisasi Administratif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Lubuk Pakam.

Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13





#### Lampiran 1: Surat Penelitian Dan Balasan Penelitian



Hal

#### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

08 March 2025 M

08 Ramadhan 1446

Nomor: 6444/05/C.4-VIII/III/1446/2025 Lamp

: 1 (satu) Rangkap Proposal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di-

Makassar

الشك اخرعاليكم وزيحة الغة وتزكانه

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 450/05/A.2-II/III/46/2025 tanggal 7 Februari 2025,

menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

: ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD Nama No. Stambuk : 10573 1116721

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

lurusan : Akuntansi Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Maret 2025 s/d 12 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

النسك المثرعلي كم ورحة والمعة ويركائه

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



#### PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

Nomor

5581/S.01/PTSP/2025

Kepada Yth.

Lampiran

**Bupati Pangkep** 

Perihal

Izin penelitian

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6444/05/C.4-VIII/III/1446/2025 tanggal 08 Maret 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama

: ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD

Nomor Pokok

105731116721

Program Studi Pekerjaan/Lembaga

Akuntansi Mahasiswa (S1)

Alamat

Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

" PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Maret s/d 10 Mei 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.SI. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makass
2. Perlinggal.



Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.

Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

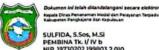
Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

emikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 15 April 2025

Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan







#### PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP Ji. Sulton Hasahuddin No. 33 Pannsajana Telo 784101 125927-Fax 323908

Pangkep. 16 April 2025

Nomor : 800/ 12 /IV/UPTSP PKP/2025

Sifat : Biasa Lamp. :-

Hal Persetujuan

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di-

Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. IPT/111/DPMPTSP/III/2025 Tanggal 15 April 2025 Penhal Permohonan izin Penehtan , bahwa dalam rangka melaksanakan Penelitian Kepada :

Nama . ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD

Nomor Pokok : 105731116721

Judul : "Pengaruh Sanksi Administratif dan Kesadaran

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Kantor Samsat

Kabupaten Pangkep"

dengan ini Kantor kami terbuka sebagai wadah dan memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan dalam penelitian tersebut sepanjang bahan – bahan keterangan/Data yang di dapat untuk keperluan akademis yang tidak untuk di publikasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. KEPALA UPTB PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP

KASUBAG TATA USAHA

H. HERMAN, SKM

Pangket Pembina NIP. 196805101988031011

Tembusan Yth;

# Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

#### **Kuesioner Penelitian**

# PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN PANGKEP

#### Petunjuk Pengisian:

- 1. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna keperluan penelitian akademik.
- 2. Jawaban Anda akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
- Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda menggunakan skala berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)

#### A. Identitas Responden (Opsional, hanya untuk klasifikasi data)

	Jenis Kelamin:  Laki-laki
1.	Jenis Kelamin:
	Laki-laki
	Perempuan
2.	Usia:
	☐ < 20 tahun
	☐ 20-30 tahun
	☐ 31-40 tahun
	☐ > 40 tahun
3.	Pekerjaan:
	□ ASN
	☐ Karyawan Swasta
	☐ Wirausaha
	☐ Lainnya, sebutkan:
4.	Apakah Anda memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di
	Kabupaten Pangkep?
	□ Ya
	□ Tidak
5.	Apakah Anda rutin membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu?

Ш	Ya
П	Tidal

# B. Pertanyaan Kuesioner

# 1. Sanksi Administratif (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak					
	yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.					
2.	Sanksi denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang					
	terlambat membayar pajak cukup memberatkan					
3.	Sanksi administrasi yang diterapkan saat ini efektif dalam					
	meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
4.	Saya merasa terdorong untuk membayar pajak tepat					
	waktu karena takut terkena sanksi administrasi.					
5.	Menurut saya, sanksi administrasi saat ini masih kurang	4				
	tegas dalam meningkatkan kepatuhan pajak.	1				

# 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memahami bahwa pajak kendaraan bermotor					
	adalah kewajiban yang harus dipenuhi.					
2.	Saya mengetahui bahwa pajak kendaraan bermotor					
	berkontribusi terhadap pembangunan daerah.					
3.	Saya selalu mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran					
	pajak kendaraan saya.					
4.	Saya membayar pajak kendaraan bukan hanya karena					
	takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran pribadi.					
5.	Saya merasa pemerintah sudah cukup mensosialisasikan					
	pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.					

# 3. Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu setiap tahun.					
2.	Saya lebih memilih membayar pajak kendaraan sebelum					

	jatuh tempo untuk menghindari denda.			
3.	Saya tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.			
4.	Jika ada program keringanan pajak, saya akan lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.			
5.	Saya lebih memilih membayar pajak kendaraan secara online untuk kemudahan dan efisiensi waktu.			



Lampiran 3: Tabulasi Data Responden

No	Sank	x1.3	tatf(X1)	Ma B	Total	100.4	Kesada	an Waiib P X23 2	aiak (X2)	1 110.0	Total		Kepatuhan	Pembayara Y3	n Pajak (Y		Total
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	20	X2.1	X2.2	X2.3	32.4	X2.5	19	Y1 4	Y2 4	Y3	Y4 4	Y5 5	19
1 5 2 5 3 5 4 5 5 3	.1	1	1	4	12	4	1	5	1	- 5	16	5	3	5	3	5	21 25 22 18
3 5	3	2	4	2	16	5	1	5	5	5	21	5	5	5	5	5	25
4 5 5 3	5 2	5	5	4	24 16	5	4	5 4	5	4	23	4	4	4	5	5 2	10
6 4	4	4	4	3	19	4	3	4	4	3	18	4	2	3	4	2	15
7 3	3	3	4	3	16	4	3	3	4	3 5	17	3 5	3 5	3	4	4	17
8 4 9 5	4	4	4	3	19	5	4	4	5	5	23 22	5	5	5	5	5	19
9 5 10 5 11 4	3	5	5	4	22	4	4	4	4	2	18	4	4	3	5	5	21
11 4	5	4	5	4	21 22 22 23	5	5	5	4	4	23 23	5	4	- 5	- 5	5	19 25 21 24 22 22
12 5 13 5	3	5	5	5	23	5	5	5	5	5	23 25	5	5	5	5	2	22
14 4	3	4	4	3		4	4	4	4	2	18	4	3	4	5	3	19
15 5 16 5	2	4	4	2	18 17	4	4	4	4	4	18 20 21	2 5	2	2	4	4	14
16 5	2	4	5	3	19	5	3	4	4	5	21	5	5	3	3	4	20
17 5 18 4	2	5	5	4	22 19	5	5	5	5	5	22 25 22 25 19	5	4	4	5	5	22 23 20 25 20 25 20 25
19 5	1	4	4	5	19	4	4	5	4	5	22	4	4	4	4	4	20
19 5 20 5 21 4	5	5	5	3	19 23	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
21 4	4	3	4	3	18	4	3	4	4	4		4	4	4	4	4	20
22 5 23 5	3 5	3 5	5	3	23	5	5	5	5	2	22 19	5	5 4	5	5	5	19
24 4 25 2	4	4	4	4	18 23 20 10	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	
22 5 23 5 24 4 25 2 26 4	2	2 4	2	2	10	2	2	2	2	2	10	2 4	2	2	2	3	20 10
28 4			4	3	18	2	3		4	3	18	4	4	3	3	5	18
27 5 28 5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
29 3	3	3	3	3	15	2	4	3	2	4	15	3	3	2	3	3	14
30 4	3	4	4	3	18	4	3	4	4	4	19	4	4	4	5	4	19 25 14 20 19
31 3		5	5	3		3	4	4	3	3	10	4	4	3	4	3	
32 4 33 4	5	5	4	4	20	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
34 5 35 4 36 3	2	5	4	3	22 20 19 20 19	.5	5	5	- 5	5	25 19	5	5	4	. 5	5	24
35 4	5	4	5	4	20	4	4	4	4	3	19	5	5	5	3	5 4	23
34 5 35 4 36 3 37 5	2	3	3	3	16	5	5	5	3 5	3	17	5	5	5	5	3	20 24 23 19 23 15
38 1	2	6	3	4	15	1	<b>1</b>	(1) (1)	2	2	21 21 20	2	3	- 5	4	1	15
39 3	4	4	1	3	15	500	4	-	4	4	21	4	4	4	4	4	20
39 3 40 5 41 3	5	4	3	2	19		3	3	4	5	20	3/3	3 5	3	5	3 5	20 17 25 20
	4	4	5	4	20	4	3	4		4	20	3	4	3	5	5	20
43 5	4	5	5	3	22	5	5	4	5	5	24	5	(1)	5	5	4	23 18 24 20 24 19 22
44 3 45 5	3	3	4	4		5	4	5	5	4	20	5	5	5	5	3 5	74
45 3	3	3	4	3	21 16	5	/ 4	5	3	3	22	5	4	- 5	3	3	20
47 4	5	1	2	4	16 18	5	4	5	5	4//	20 22 22 23 16 23	5	4	- 5	5	5	24
48 4 49 5	3	5	3	3	16	5	3	3	3	3	16	4	4	4	3	4	19
50 1	1	1	2	1	6	1	-	-	13 2	7.7	5	1	2	1	1	1	8
51 5	5	5	5	5	25	5	5	5	1,15	7, 5V	25	5	5	- 5	5	5	6 25
52 1 53 5 54 1	1	1	1	1	5 25	1	1	5 15	1 5	1,00	5 25	1	5	1 6	1	1	5 25 5
54 1	5	5	5	5	25 5	5	5	5	0.5	5	5	5	1	1	5	5	5
55 1	1	1	1	1	5	1	1	1	2	1	- 6	1	2	4	5	3	15
56 3	4	4	1	4	16	4	- 6	- 5	47, 7	3	21 22 25 17	4	3	4	14	4	15 19 20 25 21 17 19
56 3 57 5 58 1	5	5	4	3	22 5	4 5	5	5	5	5	22	5	5	5	- 4	5	20
59 4	4	2	4	3	17	5	2	3	741111	3 35	17	4	3	4	5	5	21
60 4	4	4	4	3	19	4	3	40	4	A (3 A	18	3	3	4	4	3 5	17
61 4	3	4	3	4	19	5	3	3	4	2	16	5	3	2	5	5	19
62 5 63 1	5	5 2	5 2	2	21	3	3	3	3	2	25 14	2	2	3	5	5	25 17
64 3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	2	3	3	3	3	15
65 4 66 1	5	4	5	4	15 22 14	5	4	5	5	4	23	5	5.	5	5	3	15 23 20
	1 4	5	5	4	24	4 5	5	4	5	4	20	5		4	5	3	20
67 5 68 5 69 4	1	5	5	3	19	- B	5	5	5	5	24 25 18	5	5	5	5	5	25
89 4	4		4	4	23 19 20 17		4	3	4	4	18	A	3	3	4	4	20 25 18 25 23
70 5 71 4	1 4	5 4	5	1 4	17 20	4	5 4	- 5	5	4	21 20	05	5	5 4	5	5 4	20
72 5	5	5		5	25	5	151	- 5	5		25	5	5	5		5	25
72 5 73 5 74 5	5	5	5	5	25 25 23	5	4.5	5	_5 _5	5	25 26 21	5	5	5	5	5	25 25 24
74 5	4	5	5	4	23	5	2 5	4	15	4 5	21	4	5	5	5	5	24
75 5 76 4	1 4	5	5	4	17	5	4	4	5	3	25 21	5	5	5	5	5	25 22 10 23 19
77 1 78 5		2	3	2	22 10 18	2	2	2	2	2	10	2	2	5	2 5	5	10
78 5	2 4		5	3	18	5	5	5	5	3	23 20	5	3		5		23
79 4 80 5		4	4	3	19	4	3	3	4	4	17	4	4	4	4	3	20
81 3	3	3 3	5	3	18 15	5	3	3	3 4	3	17 15	5 3 4	3 4	3 4	3	3 3	20 15 18
82 4	2		3	3	15	3	3	4	4		17	4	4	4	3	3	18
83 5 84 5	1	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25 16	5	5	5	5	5 2	25
84 5 85 4	5 2 3	5 5 3	4	4	20 25 19	5	2	4	5	4	22	4	4	4	4	4	25 18 20 18 23
85 4 86 5	3	3	4	3	18	3	1	3	5 2	3	22 12 22	3	3	2	5	5	18
87 4	2	4	5	4	19	5	5	5	4	3	22	5	5	4	5	4	23
88 4 89 5	3	4	5	3	19 22 19	5	5 5 3	5	5	4	23 24 18	5	5 5	5	5	3	23
90 4	2	4	5	4	19	5	3	5	4	3	18	4	4	4	5	4	21
91 4	4		5	3	19	5	4	5	5	4	23 11	5	5	4	3	3 2	20
92 3 93 5	3	3 2 3	5	3	15	5	5	5	3	2	11	5	3	3	5	2	12
94 5	1	5	5	5	20 21	5	5	5	5	3	23 23	5	4	3	5	5	22
96 5 96 4		2 4	2	3 2	15	1	1	1	1	2	6	1	2	1	2 4	4	10
96 5 96 4 97 4	2 2	4	4	2	16	5	5	5	5	4	8 24 22 24 24	5	4	4	4	5	23 23 21 20 12 21 21 22 10 22 23 23 25 23
97 4 96 5	2	3	5	4	18	5	4	5	5	3	22	5	5	4	5	5	23
96 5 99 4	3	4	5	4	22 20	5	5	5	5	4		5	5	5	4	4	23
100 4		4	4	4	20	. 5	5	5	5	4	24	5	5	4	5	4	23

# Lampiran 4: R Tabel

# Tabel r untuk df = 51 - 100

	Tin	gkat signif	ikansi untu	ık uji satu a	arah
df = (N-2)	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0009
ui – (14-2)	Tir	ngkat signif	ikansi untu	ık uji dua a	rah
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.00
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.424
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.414
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.404
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.401
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.398
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.395
65	0.2027	0.2404		0.3126	0.393
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3704	0.390
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.385
69	0.1968	0.2335		0.3038	0.382
			0.2756	0.3038	0.379
70	0.1954	0.2319	0.2737		
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.377
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.374
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.372
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.370
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.367
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.365
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.363.
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.361
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.358
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.356
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.354
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.352
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.350
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.348
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.346
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.343
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.341
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.339
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.337
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.335
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.334
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.332
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.330
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.329
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.327
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.325
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.324
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3220
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.321

# Lampiran 5: T Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2,36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

# Lampiran 6: F Tabel

#### Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk						d	f untuk	pembil df1=(		1)					
(N2) (Siz=(n-k-1) 91	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
3f2=(n-k-1) <b>91</b>	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.7
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.7
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.7
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.7
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.7
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.

Lampiran 7: Hasil Uji Statistik Deskriptif

# Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Administratif	100	5.00	25.00	18.2900	4.36306
Kesadaran Wajib Pajak	100	5.00	25.00	19.6200	4.99450
Kepatuhan Pembayaran	100	5.00	25.00	20.0900	4.42695
Pajak					
Valid N (listwise)	100				

# Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Data

# a. Sanksi Administratif (X1)

	Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL		
X1.1	Pearson Correlation	1	.314	.559**	4.612**	.362**	.770**		
	Sig. (2-tailed)	6	.001	<.001	<.001/	<.001	<.001		
	N	100	100	100	100	100	100		
X1.2	Pearson Correlation	.314**		.335	.320**	.330**	.636**		
	Sig. (2-tailed)	.001	/4	<.001	.001	<.001	<.001		
	N	100	100	100	100	100	100		
X1.3	Pearson Correlation	.559**	.335	11/1/1	.705**	.470	.824**		
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	11 1	<.001	<.001	<.001		
	N	100	100	1,00	100	100	100		
X1.4	Pearson Correlation	.612**	.320**	.705**	1	.361**	.808**		
	Sig. (2-tailed)	<.001	.001	<.001		<.001	< 001		
	И	100	100	100	100	100	100		
X1.5	Pearson Correlation	.362**	.330**	.470**	.361**	1	. <mark>6</mark> 67**		
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	T d	<.001		
	И	100	100	ا 100 د رسم	100	100	100		
TOTAL	Pearson Correlation	.770**	.636**	.824**	.808**	.667**	1		
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001			

N 100 100

\*\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

# b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

C	0	rr	e	la	ιti	0	n	5

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.692**	.740**	.855**	.563**	.898**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.692**	1	.658**	.722**	.537**	.849***
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.740**	.658**	1	.763**	.631**	.881**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.855**	.722**	.763**	1	.526**	.901**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.563**	.537**	.631**	.526**	1	.757**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.898**	.849**	.881**	.901**	.757**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

# c. Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

#### Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TOTAL
Y1.1	Pearson Correlation	1	.823**	.710**	.585**	.486**	.880**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	.823**	1	.744**	.531**	.495**	.874**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	.710**	.744**	1	.551**	.436**	.839**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	.585**	.531**	.551	1	.542**	.780**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Y1.5	Pearson Correlation	.486**	.495**	.436**	.542**	1	.727**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	1007	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.880**	.874	.839"	.780**	.727**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	A100	100	100	100

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

# Lampiran 9: Hasil Uji Reabilitas Data

# a. Sanksi Administratif (X1)

# **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha N of Items

# b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

# **Reliability Statistics**

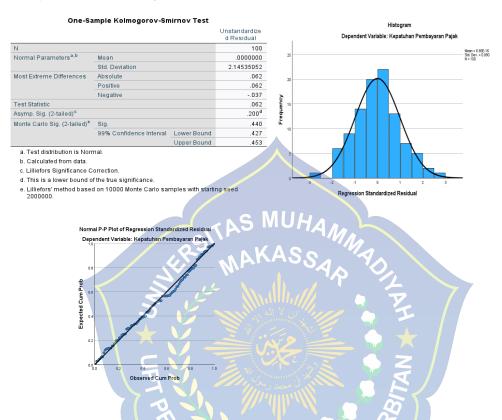
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.909	5

# c. Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

# **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	5

# Lampiran 10: Hasil Uji Normalitas

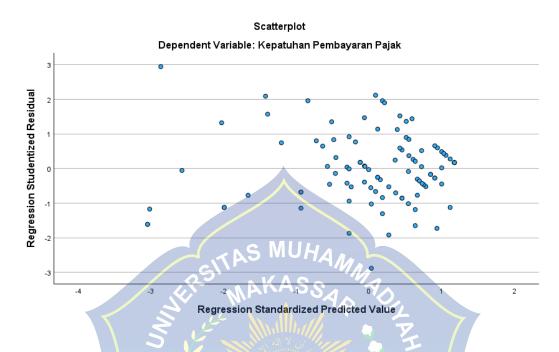


# Lampiran 11: Hasil Uji Multikolonieritas

Lampirar	n 11: Hasil Uji	Multikolonie	ritas				
Coefficients <sup>a</sup> AN							
			Standardized				
	Unstandardize	ed Coefficients	Coefficients			Collinearity S	tatistics
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	4.199	.991		4.236	<.001		
Sanksi Administratif	.113	.068	.111	1.654	.101	.535	1.869
Kesadaran Wajib Pajak	.705	.060	.795	11.820	<.001	.535	1.869

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

Lampiran 12: Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 13: Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

			Coe	fficients <sup>a</sup>	Z/		
		0 1			Standardize		
			Unstand	lardized	d		
		10/0	Coeffi	cients	Coefficients		
Model		70.	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)		4.199	.991		4.236	<.001
	Sanksi Adm	inistratif	.113	.068	.111	1.654	.101
	Kesadaran	Wajib	.705	.060	.795	11.820	<.001
	Pajak						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

# Lampiran 14: Hasil Uji T

#### a. Hasil Uji T Sanksi Administratif (X1)

#### Coefficientsa

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.965	1.459		5.461	<.001
	Sanksi Administratif	.663	.078	.653	8.544	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

# b. Hasil Uji T Kesadaran Wajib

# Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardized Co		Standardized Coefficients		
Model		BAS ISH	d. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5 4.944	.890	1/1	5.552	<.001
	Kesadaran Wajib Pajak	772	.044	.871	17.546	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

# Lampiran 15: Hasil Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square F	Sig.
1	Regression	1484.540	2	742.270 158.016	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	455.650	97	4.697	
	Total	1940.190	99	OF	

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak
- b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administratif

# Lampiran 16: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

# **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875ª	.765	.760	2.167

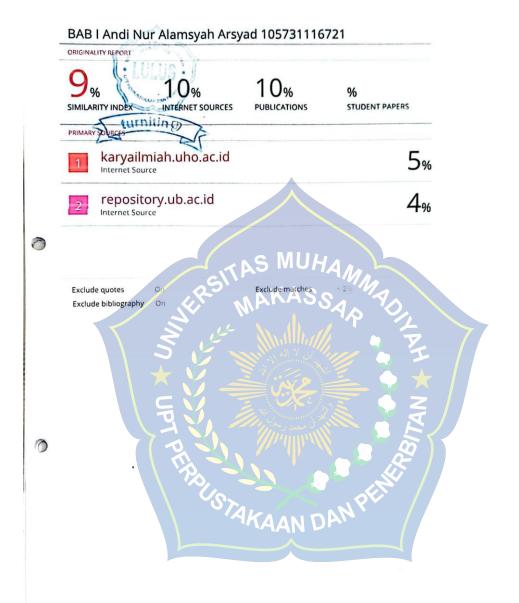
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administratif

Lampiran 17: Dokumentasi









CS Dipindai dengan CamScanner

SIMILA	ARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PA	PERS
PRIMAR	RY SOURCES	
1	digilibadmin unismuh ac.id	4
2	dspace.uii.ac.id	4
3	journals.stie-yai.ac.id Internet Source	3
4	ejournal.45mataram.ac.id S MUHA	2
	05'	
5	Rani Aprilia, Rusdi Rusdi, "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jambura Accounting Review, 2023	2
	Rani Aprilia, Rusdi Rusdi, "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jambura Accounting Review, 2023	
5	Rani Aprilia, Rusdi Rusdi, "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jambura Accounting Review, 2023 Publication	2 2
5	Rani Aprilia, Rusdi Rusdi. "Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jambura Accounting Review, 2023 Publication journal.formosapublisher.org Internet Source	2

CS Dipindai dengan CamScanner



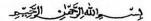


CS Dipindai dengan CamScanner





# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama

: Andi Nur Alamsyah Arsyad

Nim

: 105731116721

Program Studi: Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	23%	25 %
3	Bab 3	10%	1 %
4	Bab 4	8%	10 %
5	Bab 5	4%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

> Makassar, 05 Agustus 2025 Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588 Website: www.library.unismuh.ac.ld E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

# Made with Xodo PDF Reader and Editor



PENELITIAN KUANTITATIF

NAN	MA MAHASISWA	ANDI NUR ALAM	SYAH ARSYAD					
NIM		105731116721	3					
PRC	GRAM STUDI	<u>AKUNTANSI</u>						
JUD	OUL SKRIPSI	KENDARAAN BE	IKSI ADMINISTRATE DAN KESADARAN RMOTOR TERHADAP KEPATULAN PEMBA AMSAT KABUPATEN PANGKEP	WAJIB PAJAK YARAN PAJAK				
NAM	MA PEMBIMBING 1	MASRULLAH, S.E	., M.Ak					
	MA PEMBIMBING 2	INDRIANA, S.E.,						
NAM	MA VALIDATOR		ANUDDIN UA, S.E., M.SI	Λ				
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf				
1	Instrumen Pengumpulan data (data primer)	23 Juni 2025	S WIUHA Sesual	Ym				
2	Sumber data (data sekunder)	23 Juni 2025	Sesual	(June				
3	Raw data/Tabulasi data (data primer)	23 Juni 2025	Sesuai	1 (In				
4	Hasil Statistik deskriptif	23 Juni 2025	Sesuai					
5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	23 Juni 2025	Sesuai	(In				
6	Hasil Uji Asumsi Statistik	23 Juni 2025	AAN DASesuai	(In				
7	Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis	23 Juni 2025	Sesuai	Vi				
8	Hasil interpretasi data	23 Juni 2025	Sesuai	(V)				
9	Dokumentasi	23 Juni 2025	Sesuai					



#### LEMBAR KONTROL VALIDASI ABSTRAK

NAM	IA MAHASISWA	Andi Nur A	lamsyah Arsyad	
NIM		10573111672	21 3 120 1	
PRO	GRAM STUDI	Akuntansi	***	
JUD	UL SKRIPSI	Bermotor 7	Sanksi Administratif d <mark>an Kesad</mark> aran Wajib Pajak K Ferhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan or Samsat Kabupaten Pangkep.	endaraar Bermoto
NAN	A PEMBIMBING 1	Masrullah, S	.E., M.Ak	
NAN	A PEMBIMBING 2	Indriana, S.E	i., M.AkC	
NAN	A VALIDATOR	Sherry Adeli	a S.E, M.Mktg	
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	△ Uraian Perbaikan/saran	*Paraf
1	Abstrak	27 JULI 2025	Banyak Typo penulisan, Tolong dicek kembali, sebelum di print. Terutama penulisan asing	8

\*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

#### **BIOGRAFI PENULIS**



ANDI NUR ALAMSYAH ARSYAD. Panggilan Arya Lahir di Tonasa pada tanggal 15 Mei 2002 dari pasangan suami istri Bapak Arsyad dan Ibu Halwia. Peneliti adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini, peneliti berdomisili di Kel. Tonasa, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, Provinsi

Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan peneliti dimulai di SD Negeri 3 Tonasa 1 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros dan lulus pada tahun 2017, serta menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkep pada tahun 2020. Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan studi di Program Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan hingga saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di program studi tersebut. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akhir pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.